BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Tempat Tinggal Responden

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan, maka akan dilaporkan hasil penelitian dengan meneliti empat orang nazhir atau responden yang penulis jadikan sebagai subyek dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan dimulai dengan mendiskripsikan secara keseluruhan tempat tinggal responden yang diteliti, maka yang dimaksudkan dengan responden yang berdomisili di Kecamatan Martapura, yaitu ada responden yang berdomisili di Kecamatan Martapura Kota, yaitu di desa Sungai Paring sebanyak satu orang responden, dan Desa Tanjung Rema sebanyak satu orang responden, dan ada yang berdomisili di Kecamatan Martapura Timur, yaitu di desa Tambak Anyar satu orang responden, dan ada yang berdomisili di Kecamatan Martapura Barat, yaitu di desa Sungai Rangas Hambuku satu orang responden, dan jarak rumah nazhir yang satu dengan nazhir yang lainnya agak berjauhan.

Dengan demikian pada umumnya semua responden yang diteliti dalam penelitian ini berdomisili di desa-desa yang ada dilingkungan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat tinggal seluruh responden yang diteliti dapat dirinci dan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1 Tempat Tinggal Responden:

No.	Nama dan Alamat	Jumlah
1.	Kecamatan Martapura Kota, desa Tanjung Rema	1
2.	Kecamatan Martapura Kota, desa Sungai Paring	1
3.	Kecamatan Martapura Timur, desa Tambak Anyar	1
4.	Kecamatan Martapura Barat, desa Sungai Rangas Hambuku	1
	Jumlah	4

2. Umur Responden

Dari empat orang responden atau nazhir yang menjadi subyek dalam penelitian Tesis ini, maka berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat peneliti sampaikan bahwa diantara responden yang telah diteliti, mereka ada yang telah berusia empat puluh tahun, dan ada yang telah berusia lima puluh tahun, dan ada yang telah berusia lima puluh lima tahun, dan ada yang telah berusia lima puluh tujuh tahun.

Jadi usia responden yang telah diteliti dalam penelitian ini berkisar sekitar empat puluh tahun sampai dengan usia lima puluh lima tahun keatas, kategori dewasa atau berusia tua.

Untuk lebih jelasnya mengenai semua usia responden yang dijadikan subyek dalam penelitian ini, maka dapat peneliti rinci sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Usia Responden:

No.	Usia	Jumlah
1.	40 tahun	1 Orang
2.	50 tahun	1 Orang
3.	55 tahun	1 Orang
4.	57 tahun	1 Orang
	Jumlah	4 Orang

3. Pendidikan Responden

Untuk pendidikan responden, tampak jelas hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa pendidikan responden bahwa keseluruhannya berlatar belakang pendidikan keagamaan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena mereka bertempat tinggal dan menuntut ilmu di kota yang berjulukan “Serambi Mekkah” kotanya para ulama dan santri.

Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang pernah ditempuh atau diselesaikan oleh responden sebagai sebuah pengalaman yang mereka tempuh pada pendidikan non formal.

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan, baik secara individu atau kelompok. Pendidikan non formal responden biasanya adalah pelajaran kitab-kitab klasik pada pondok pesantren dan madrasah, pengelolaannya tidak memakai kurikulum nasional atau kementerian

agama dan kementerian pendidikan, melainkan kitab klasik yang dibacakan oleh seorang guru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan bahwa dari empat orang nazhir yang diteliti untuk pendidikan nonformal ternyata semua nazhir telah berpendidikan sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah Pondok Pesantren.

4. Profesi Responden

Bagian keempat dari identitas responden yang termuat dalam laporan ini adalah bidang profesi yaitu suatu pekerjaan yang digeluti oleh semua responden dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai umat muslim yang telah memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka diantara mereka ini ada yang berprofesi menjadi guru di madrasah swasta sebanyak satu orang, dan ada pula yang berprofesi sebagai guru ngaji duduk, dan ada yang mengajar di pondok pesantren, dan ada yang berprofesi sebagai pedagang sebagai usaha utama.

Keadaan ini lebih jelasnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Profesi Responden:

No.	Jenis Profesi	Jumlah
1.	Guru Madrasah	1 Orang
2.	Guru Pondok Pesantren	1 Orang
3.	Guru Ngaji Kitab	1 Orang
4.	Pedagang	1 Orang
	Jumlah	4 Orang

B. Deskripsi Kasus Perkasus.

Adapun kasus-kasus yang penulis ketahui selama mengadakan peninjauan awal sampai dengan penelitian mengenai praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ini sebagai berikut :

1. Kasus Pertama.

Pada tahun 2007 “KH” di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah wafat, Pada Tahun 2000 mesjid yang dikelola “KH” telah mengalami perubahan, pada waktu itu sebelum renovasi panitia mesjid pada masa itu mengadakan musyawarah dengan pengurus mesjid lainnya, para ulama dan tokoh masyarakatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka renovasi mesjid. Akhirnya rapat menyetujui akan diadakan renovasi total terhadap seluruh bangunan mesjid.

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsian dilakukan dengan menghibahkan benda-benda wakaf terdahulu setelah dibongkar. Adapun benda benda wakaf itu berupa tiang mesjid, atap dan jendelanya, dan lantainya yang berasal dari wakaf si pembuat mesjid itu benda-benda wakaf ini tidak lagi difungsikan sebagai benda wakaf mesjid asal yang berasal dari kayu ulin, seluruh benda wakaf yang dibabak ini dihibahkan ke mesjid lainnya yang memerlukan. Kini mesjid yang direnovasi tersebut berdiri dengan megah wujudnya lebih besar dari yang dulu.

Adapun alasan pengalihfungsian wakaf tersebut adalah bahwa mesjid yang ada sudah tidak bisa menampung jumlah jama'ah yang banyak, agar mesjid ini bisa menampung jumlah jama'ah shalat Jum'at, hari raya 'Idul Fitri dan hari raya 'Idul

Adha, dan kegiatan agama lainnya, maka diadakan perluasan pembangunan mesjid dengan tujuan masyarakat dapat shalat bersama sama di dalam mesjid tidak lagi di halaman mesjid. Pengalihfungsian tidak meminta izin ahli waris, sementara pendirinya sudah lama meninggal dunia, kemudian tidak melalui prosedur yang resmi. Dan tidak melalui persetujuan menteri agama.

Akibatnya dengan adanya alihfungsi terhadap harta wakaf yang terdahulu itu, dampak positifnya benda wakaf dapat dirasakan kegunaannya, dan besar manfaatnya untuk kepentingan kemaslahatan umum. Renopasi mesjid dilakukan secara menyeluruh, ini dilakukan pada tahun 2000. Mesjid ini dibangun pada tahun 1897. Diwakafkan untuk kepentingan komunitas muslim.

Adapun akibat negatif yang dirasakan masyarakat tidak untuk sementara tidak ada. Alihfungsi benda wakaf ini terjadi pada tahun 2000. Mesjid ini asalnya berada di kampung lain, dan dipindahkan karena mengalami kebakaran, peristiwa ini terjadi pada masa penjajahan belanda.

2. Kasus Kedua

Pada tahun 2000 “JI” di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah telah habis masa baktinya, pada kepengurusan sebelumnya, mesjid telah mengalami renopasi, Dalam rangka renopasi pada kepengurusan mesjid sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pengurus mesjid lainnya, dan para ulama dan tokoh masyarakat, dan warga mesjid setempatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka renopasi mesjid. Perenopasian dilakukan pada tahun 2001

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsian wakaf mesjid dilakukan dengan menjual benda wakaf mesjid yang terdahulu dan hasilnya dibelikan untuk benda wakaf yang baru. Adapun benda-benda wakaf yang dibongkar dan dijual antara lain berupa tiang mesjid, ataf, jendela, dinding dan lantai mesjid yang berasal dari kayu ulin kepada pedagang kayu ulin. dan hasilnya diperuntukkan untuk merenovasi mesjid yang memerlukan biaya bangunan mesjid yang baru yang berasal dari beton, sebelum renovasi pembongkaran tidak meminta izin ahli waris yang berwakaf, sementara yang berwakaf telah meninggal dunia, pengalihfungsian tidak melalui prosedur yang resmi.

Adapun alasan mengadakan pengalihfungsian benda wakaf tersebut adalah dalam keadaan memaksa, sebagian lantai mesjid terbenam kedalam, sehingga bangunan mesjid miring, selain itu atap mesjid mengalami kebocoran, sehingga apabila hari hujan masyarakat bisa kehujanan dalam melaksanakan shalat berjama'ah, seperti shalat Jum'at, hari raya 'Idul Fitri dan hari raya 'Idul Adha terganggu tidak dapat terlaksana,

Akibat positifnya dengan adanya alihfungsi terhadap harta wakaf yang terdahulu itu semua masyarakat dapat kembali memanfaatkan mesjid sebagai sarana beribadah secara berjama'ah, baik untuk shalat maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Sedangkan akibat negatifnya tidak ada, masyarakat memanfaatkan mesjid sebagaimana biasanya.

Mesjid ini dibangun pada masa pemerintahan belanda berasal dari wakaf tanah salah seorang warga desa Sungai Rangas Hambuku.

3. Kasus Ketiga

Pada tahun 2006 “JI” di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah habis masa baktinya, pada kepengurusan sebelumnya, mesjid telah mengalami renopasi, Dalam rangka renopasi pada kepengurusan mesjid sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pengurus mesjid lainnya, dan para ulama dan tokoh masyarakat, dan warga mesjid setempatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka renopasi mesjid. Perenopasian dilakukan pada tahun 1986.

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsiannya benda wakaf yang lama dilakukan dengan menjual benda wakaf mesjid terdahulu dan hasilnya dibelikan untuk benda wakaf mesjid yang baru. Adapun benda - benda wakaf mesjid terdahulu yang dibongkar untuk dijual itu berupa tiang mesjid, atap, jendela, dinding dan lantai mesjid yang berasal dari kayu ulin, dan hasil dari penjualan benda wakaf ini dibelikan kembali kebenda wakaf yang baru dari beton.

Menurut “KA” guru-guru terdahulu tidak menegah dan membiarkan saja benda wakaf di atas untuk dijual demi pembaharuan mesjid agar benda wakaf yang asal dapat dimanfaatkan hasilnya, jika dibiarkan seadanya akan habis, siwakif tidak lagi mendapat pahala terhadap harta yang di wakafkannya. Renopasi yang dilakukan tidak meminta izin kepada wakif, karena telah meninggal dunia dan tidak meminta izin kepada ahli waris siwakif sebelumnya, dan juga tidak melalui prosedur yang resmi, karena pada masa itu nazhir merasa cukup dengan pendapat *mazhab* yang membolehkan alihfungsi. Pembabakan dilakukan sebagai perenopasian wakaf

dilakukan pada tahun 2000, bangunan mesjid yang berasal dari kayu ulin terdahulu dijual sebagai dana tambahan dalam merenopasi mesjid.

Adapun alasan mengadakan alihfungsi terhadap benda wakaf itu adalah keadaan mendesak, mesjid roboh telah mengalami rusak berat, baik lantai, maupun bagian mesjid yang lainnya sudah rusak, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk shalat berjama'ah, seperti shalat Jum'at, hari raya 'Idul Fitri dan hari raya 'Idul Adha dan kegiatan ibadah lainnya, posisi mesjid ini dipingir sungai.

Akibatnya dengan adanya alihfungsi terhadap harta wakaf yang terdahulu itu masyarakat dapat memanfaatkan kelestarian mesjid sebagai sarana beribadah secara berjama'ah baik untuk shalat maupun kegiatan keagamaan lainnya, dengan dampak negatifnya belum dirasakan masyarakat menurut mereka tidak ada, karena sudah ada wakaf pengganti dari yang lama. Mesjid ini dibangun pada masa penjajahan pemerintahan belanda, berasal dari wakaf tanah salah seorang warga desa Tambak Anyar di RT.3, RW 1 .

4. Kasus Keempat.

Pada tahun 2000 "AH" di angkat sebagai nazhir menggantikan kepengurusan langgar sebelumnya yang telah habis masa baktinya, pada awalnya langgar ini dibangun dari peralihan wakaf tanah seorang warga Sungai Paring, namun karena posisi tanah wakaf ini berdekatan dengan jalan raya, pengurus tanah wakaf sebelumnya menjual tanah wakaf warga itu ke orang lain untuk keperluan pribadi, dari hasil penjualan itu nazhir langgar membeli tanah baru untuk dibangun sebuah langgar, menurut "AH" sebelumnya menjual tanah wakaf tersebut di atas, nazhir

telah bermusyawarah dengan pengurus langgar lainnya, dan terhadap warga setempat Pembangunan langgar dimulai pada tahun 1980

Dalam pelaksanaannya tanah wakaf yang dialihfungsikan itu, “AH” menjual tanah wakaf terdahulu, kemudian hasilnya dibelikan ke tanah wakaf yang baru, Tanah wakaf terdahulu dijual kepada salah seorang warga desa Sungai Paring yang kebetulan mau membeli tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang baru letaknya agak jauh dari jalan raya sesuai dengan harga penjualan tanah wakaf terdahulu, kemudian pada tahun yang sama dibuatlah sebuah langgar. Pengalihfungsian tanah ini tanpa ada izin sipemilik yang masih hidup, dan tidak melalui prosedur yang berlaku.

Adapun alasan mengadakan alihfungsi terhadap benda wakaf itu adalah berdekatan dekat jalan raya, dianggap oleh panitia wakaf akan mengganggu ketenangan masyarakat yang beribadah pada tempat itu jika nantinya di atas tanah wakaf itu dibangun tempat ibadah, mengingat jalan raya yang penuh dengan hiruk pikuk dari suara mobil dan lainnya.

Akibatnya dengan adanya pengalihfungsian terhadap harta wakaf yang terdahulu itu, dampak positifnya tanah wakaf dapat dijamin kelestarian manfaatnya untuk kepentingan kemaslahatan umum, sedangkan akibat negatifnya tidak ada, karena sudah ada wakaf pengganti yang asal.

C. Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Martapura

Mengenai praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura setelah peneliti melakukan kegiatan penggalan data di lapangan ternyata pelaksanaan pengalihfungsian wakaf yang di lakukan oleh responden dalam

penelitian ini, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari praktek pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura ada tiga bentuk praktik pengalihfungsian harta wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura.

Pertama dengan menghibahkan benda wakaf yang lama ke mesjid yang lain, kedua menjual benda wakaf mesjid yang lama hasilnya dijual ada dua kasus yaitu pada kasus pertama dan kasus kedua, dan yang ketiga menjual tanah wakaf yang lama dan hasilnya dibelikan pada wakaf baru pada kasus keempat. sebagai hasil musyawarah.

Mengenai praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana ada pada tabel berikut:

Tabel 5 Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Martapura.

No.	Praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir	Kasus	Jumlah
1	Menghibahkan benda wakaf terdahulu pada mesjid yang lain	1	1
2.	Menjual benda wakaf terdahulu dan hasilnya dijual, kemudian hasilnya dibelikan pada benda wakaf yang baru	2,3	2
3.	Menjual tanah wakaf terdahulu, kemudian hasilnya untuk membeli tanah wakaf yang baru	4	1
	Jumlah	4	4

Dari rincian di atas menunjukkan bahwa dari empat kasus yang diteliti yaitu praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, membongkar benda wakaf terdahulu dan setelah itu dijual, dan hasilnya dibelikan pada benda

wakaf yang baru menempati peringkat teratas yaitu tiga kasus, yaitu terjadi pada kasus kedua, kasus ketiga dan kasus keempat, sedangkan nazhir yang membongkar benda wakaf terdahulu dan setelah itu menghibahkannya pada mesjid yang lain ada satu kasus yaitu pada kasus kesatu.

D. Alasan Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Martapura.

Dari data yang didapat menunjukkan bahwa terjadinya pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura disebabkan oleh tiga alasan yaitu alasan bahwa mesjid yang ada sudah tidak dapat menampung jumlah jama'ah yang banyak, dalam keadaan memaksa, mesjid rusak berat, dan mengganggu ketenangan ibadah.

Untuk lebih jelasnya dapat dirinci, dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Alasan Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir di Kecamatan Martapura.

No.	Alasan pengalihfungsian	Kasus	Jumlah
1.	Tidak dapat menampung banyaknya jumlah jama'ah	1	1
2.	Dalam keadaan memaksa	2,3	2
3.	Berdekatan dengan jalan raya	4	1
	Jumlah	4	4

E. Akibat Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir di Kecamatan Martapura

Setiap permasalahan yang berhubungan dengan kebendaan dan kaitannya dengan hubungannya dengan sosial keagamaan tentunya sering menimbulkan akibat-akibat, baik akibat yang positif maupun yang berakibat negative, begitu pula dengan

pratik pengalihfungsian wakaf oleh positif yang timbul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir adalah, benda wakaf mesjid dapat dirasakan kelestarian manfaatnya oleh masyarakat umum.

Dampak negatifnya yang dirasakan dengan adanya pengalihfungsian wakaf adalah benda wakaf yang lama tidak ada. Mengenai akibat positif pengalihfungsian benda wakaf oleh nazhir dapat dirinci sebagai berikut di dalam tabel:

Tabel 7 Akibat Positif Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir di Kecamatan Martapura

No.	Akibat positif pengalihfungsian	Kasus	Jumlah
1.	Masyarakat dapat menikmati kelestarian manfaat mesjid sebagai sarana ibadah.	1, 2,3,	3
2.	Masyarakat dapat menikmati kelestarian manfaat tanah langgar sebagai sarana ibadah.	4	1
	Jumlah	4	4

Dari akibat yang dirasakan oleh masyarakat pada wakaf yang mengalami pengalihfungsian, mesjid dapat dirasakan kelestarian manfaatnya yaitu pada kasus satu, kasus kedua, kasus ketiga, dan satu kasus pada kasus keempat pada tanah wakaf baru yang di atasnya dibangun sebuah langgar manfaatnya dapat dirasakan.

Adapun akibat negatifnya, tidak ada baik pada kasus satu, kasus dua, kasus tiga, dan kasus keempat. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti semua akibat negative pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura semuanya

tidak ada dampak negatifnya, baik pada kasus ke satu, kasus ke dua, kasus ke tiga dan terakhir pada kasus ke empat.

F. Analisis

Setelah data dideskripsikan, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis data yang telah disajikan dengan hukum Islam. Dalam batasan istilah telah disebutkan bahwa yang dimaksud praktik pengalihfungsian itu adalah mengalihkan harta wakaf yang tidak bergerak oleh nazhir, di Kecamatan Martapura,

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka telah ditemukan ada beberapa macam praktik pengalihfungsian yang dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Martapura yaitu dengan cara menghibahkan benda wakaf mesjid yang dibabak kepada mesjid lainnya terjadi pada kasus pertama, dan menjual benda wakaf yang terdahulu, kemudian hasilnya dibelikan kembali untuk wakaf yang baru pada kasus kedua, kasus ketiga dan kasus keempat pengalihfungsian wakaf di Kecamatan Martapura, hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai alasan dan akibat yang dikemukakan oleh nazhir wakaf mesjid dan langgar. Oleh sebab itu yang akan penulis bahas dengan analisis hukum Islam adalah seputar pada permasalahan tersebut sebagaimana yang telah diformulasikan pada rumusan masalah, sebagaimana berikut:

A. Praktik Pengalihfungsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Martapura.

Setelah peneliti melakukan riset dilapangan ternyata ada beberapa praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura.

Adapun bentuk-bentuk praktik yang dilakukan oleh nazhir dalam mengalihfungsikan wakaf di kecamatan Martapura adalah sebagai berikut;

1. Menghibahkan benda wakaf terdahulu kepada mesjid lain setelah dibabak yaitu pada kasus satu
2. Menjual benda wakaf mesjid terdahulu dan hasilnya dibelikan pada benda wakaf yang baru, terjadi pada kasus kedua dan kasus ketiga.
3. Menjual tanah wakaf terdahulu, kemudian dijual dan hasilnya untuk membeli tanah wakaf yang baru, terjadi pada kasus ke empat.

Pada kasus pertama pelaksanaan alihfungsi yaitu menghibahkan benda wakaf yang terdahulu untuk mesjid lain. Dalam pelaksanaannya pemugaran dilakukan dengan menghibahkan benda-benda wakaf berupa tiang mesjid, atap dan jendelanya setelah dibongkar yang berasal dari wakaf si pembuat mesjid itu benda-benda wakaf ini tidak lagi difungsikan sebagai benda wakaf mesjid asal, menurut pengelola mesjid benda wakaf yang telah dibongkar tidak lagi diperlukan sebagai bahan perbaikan mesjid, karena mesjid akan diperluas atau diperbesar bentuknya dari mesjid semula dengan menggunakan bahan wakaf yang baru secara keseluruhan, semua benda wakaf mesjid yang lama akan hibahkan ke mesjid lainnya yang memerlukan. Menurut hukum Islam pada kasus pertama penghibahan benda wakaf mesjid seperti yang disebutkan di atas pada prinsipnya dilarang, karena wakaf tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dirusak oleh siapapun, karena pada larangan tersebut tidak menyebutkan adanya pengecualian dalam keadaan apapun, hal ini bisa dilihat adanya larangan Rasulullah

pada penghibahan benda wakaf, karena pada hadist itu tidak menyebutkan adanya kebolehan penghibahan benda wakaf pada mesjid yang lain. Demikian pula pendapat Al-Syafi'i dan Maliki bahwa wakaf itu tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh dijual dan diwariskan, jika mengalami perubahan maka harus dibiarkan begitu saja.

Namun nazhir pada kasus kesatu berbeda pendapat, bahwa menghibahkan benda wakaf mesjid menurut nazhir pada kasus pertama boleh saja asal benda wakaf yang dihibahkan ke mesjid yang lain tersebut, menurutnya boleh dihibahkan ke mesjid yang lain jika benda wakaf tersebut tidak lagi diperlukan, karena mesjid akan diperluas bentuknya untuk kepentingan komunitas muslim. Beliau mengatakan boleh menghibahkan benda wakaf berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan, karena keadaan mesjid sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf, mesjid sudah tidak dapat menampung banyaknya masyarakat yang akan beribadah ditempat itu, berdasarkan fakta yang sering terjadi.

Menurut nazhir benda wakaf pada kasus pertama tidak boleh dihibahkan keselain mesjid seperti mushalla, madrasah dan lain-lain, karena tidak sama atau setingkat. Persoalan kasus pertama jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan perubahan atau penukaran harta wakaf dalam hal-hal tertentu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama, yaitu;

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf.

b. Karena kepentingan umum¹.

Pada poin b karena kepentingan umum, dapat memberikan inspirasi pada kasus pertama dengan alasan bertambah banyaknya jama'ah shalat wajib sehingga mesjid tidak mampu lagi menampung jumlah jama'ah yang lebih banyak dari kapasitas mesjid yang ada, jika dibiarkan apa adanya tentu saja makin lama makin tidak berdampak maslahat. Melihat perkembangan yang ada itu tentu saja nazhir harus betul-betul menyikapi persoalan yang ada dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Menurut penulis perubahan di atas berupa alihfungsi harta wakaf adalah boleh, hanya sebagai pengecualian, yaitu sebagaimana yang dialami pada kasus satu di atas karena adanya tuntutan kemaslahatan yang lebih besar. Namun jika ingin lebih berhati-hati hadist yang melarang penghibahan secara umum, layak dipertimbangkan agar perluasan mesjid betul-betul dilakukan secara arif dan bijak, sesuai dengan izin menteri agama secara procedural. Karena PP. nomor 28 Tentang Perwakapan 1977 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur peralihan pada kasus kesatu di atas itu harus ada izin menteri agama, walaupun nazhir punya wewenang untuk mengembangkan mesjid, beda halnya seperti yang pernah terjadi pada masa 'Usman beliau melakukan perluasan mesjidil Haram karena alasan keadaan zaman yang berubah banyak umat muslim yang datang untuk beribadah di mesjidil haram, dan tidak tertampung untuk beribadah di mesjid tersebut, tanpa ada permohonan dan

¹Sri Kartika Mawardi, "Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA", Tesis, (Medan : USU, 2008), h. 89.

perizinan pihak berwenang, karena beliau adalah *khalifah* dan tugas untuk mengembangkan wakaf dengan sendirinya sudah menjadi tanggungjawab *khalifah* 'Usman tanpa harus memohon dan ada perizinan dari pihak tertentu. Demikian yang dilakukan *khalifah* 'Umar.

Pada kasus pertama mesjid yang mengalami perluasan tidak lagi memerlukan benda wakaf yang lama itu, karena nazhir akan merekonstruksi bangunan mesjid secara menyeluruh dengan beton dan dengan bangunan yang lebih besar dan permanen.

Pada persoalan kasus pertama penulis belum menemukan bolehnya penghibahan harta wakaf sebagai salah satu praktik alihfungsi berdasarkan al-qur'an dan sunnah. Yang ada adalah tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual belikan, dan tidak boleh diwariskan, Al-Syafi'i juga tidak membolehkan walaupun ada alasan tertentu, harus dibiarkan apa adanya, akan tetapi pengikutnya ada yang membolehkan karena ada alasan yang kuat. Beda lagi menurut pendapat Hanafiah pemindahan wakaf harus dengan izin hakim.² Hakimlah yang berwenang untuk menentukan boleh tidaknya pemindahan apapun alasannya.

Pada kasus pertama nazhir melakukan penghibahan itu untuk mewujudkan tujuan wakaf, agar benda wakaf yang telah dibongkar dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada komunitas manusia, bukan karena adanya pelarangan penghibahan dalam sebuah hadist, karena kondisi zaman yang berubah yang ditandai

²Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan (ed.), "Mengganti Wakaf", *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 461.

dengan banyak komunitas muslim yang akan melakukan ibadah terkendala. Pada persolan ini tentu saja benda wakaf yang dibongkar nazhir pada kasus satu itu tidak terkesan diterbengkalaikan dan mubazzir.

Kemudian pada kasus pertama adanya penghibahan benda wakaf harus sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan dinyatakan bahwa tidak boleh menghibahkan wakaf dengan sengaja seperti yang terdapat pada pasal (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).³

Menurut penulis penghibahan benda wakaf harus prosedural dan ada alasan yang kuat. Karena kebolehan penghibahan benda wakaf jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan nomor 41 tahun 2004, bisa berakibat illegal dan kena sanksi pidana sebagaimana disebutkan di atas.

Pada kasus kesatu, benda wakaf telah dihibahkan pada mesjid yang lain tentu saja nilai peralihan benda wakaf tidak ada secara jual beli untuk kepentingan mesjid asalnya, tentu saja secara financial pembangunan mesjid tersebut tidak mendapatkan apa-apa, namun mengingat manfaatnya karena dimanfaatkan oleh mesjid yang lain, mungkin saja akan tetap lestari. Dalam agama Islam kita harus melakukan kebaikan dalam hidup di dunia, dan di akhirat kita akan mendapat ganjaran diakhirat kelak,

³Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2005), h. 181.

karena berwakaf adalah salah satu kebaikan yang harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk adanya praktik alihfungsi di dalamnya.

Namun demikian menurut penulis pengaruh yang terjadi dengan adanya penghibahan sebagai salah satu praktik alihfungsi pada kasus pertama adalah statusnya sebagai benda wakaf tidak hilang dengan adanya perubahan peruntukan/alihfungsi, maka statusnya tetap sebagai tanah wakaf, hanya dipindahkan ke mesjid lain.

Selanjutnya pada kasus kedua dan kasus ketiga, nazhir menjual semua benda wakaf yang dibongkar, baik yang berupa jendela, lantai, dan dinding mesjid, kemudian hasilnya untuk membeli bahan material bangunan mesjid yang wujudnya tidak sama, demikian pada kasus ke empat menjual tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif, dan hasilnya dibelikan pada tanah wakaf baru, adanya tindakan menjual semua benda wakaf, adalah salah satu solusi untuk melestarikan benda wakaf yang lama, agar manfaatnya dapat dirasakan terus menerus oleh masyarakat meskipun wujudnya tidak sama lagi dengan benda wakaf yang lama, menurut nazhir pada kasus ketiga jika tidak boleh dijual untuk dialih fungsikan, maka manfaatnya hanya sampai disitu saja, sementara yang membolehkan, karena lebih menekankan manfaatnya harus mengalir sepanjang masa. Jika melihat manfaatnya harus mengalir sepanjang masa berarti pada kasus kedua dan kasus ketiga adanya penjualan itu untuk pembangunan mesjid baru. Demikian halnya pada kasus keempat pengalihfungsian tanah untuk membeli tanah baru untuk dibangun langgar di atasnya.

Namun yang harus diperhatikan nilai wakaf yang baru harus senilai dengan nilai wakaf yang lama.

Pada kasus kedua dan kasus ketiga sampai pada kasus keempat terhadap praktik pengalihfungsian wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Martapura. Menurut Imam Ahmad Bin Hambal dan Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut.⁴ Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁵ Menurut kedua pendapat ulama tersebut, maka praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di atas hendaknya dengan alasan yang dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah yaitu ada alasan yang mendatangkan maslahat.

Diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya pada kasus kedua dan kasus ketiga sampai pada kasus keempat demi kemaslahatan yang mendesak, siwakif akan terus menerus mendapatkan pahala yang mengalir selama benda wakaf yang diwakafnya masih berguna. Akan tetapi tindakan nazhir yang mengalihfungsikan benda wakaf pada kasus kedua dan kasus ketiga samapai dengan kasus keempat, bila diteliti lebih mendalam, maka didapati perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam itu sendiri antara lain:

⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), h. 80.

⁵*Ibid.*, h. 80

1. Ulama Hanafiyah menyatakan boleh menukar harta wakaf, bila sejak awal sudah diisyaratkan hal itu, atau harta wakaf itu sudah tidak memberi manfaat sama sekali, tapi dalam hal ini harus ada izin dari hakim. Bahkan Abu Yusuf menyatakan boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih manfaat asalkan tidak menyimpang dari maksud wakif.
2. *Jumhur* ulama Malikiyah tidak membolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Sedangkan yang terdiri dari benda bergerak, mereka membolehkan. Tetapi sebagian ulama Malikiyah membolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, kalau benda tersebut tidak bermanfaat sama sekali.
3. *Jumhur* ulama Syafi'iyah juga tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Tetapi sebahagian yang lain memperbolehkan, jika tidak memberikan manfa'at sama sekali.
4. Ahmad bin Hambal memperbolehkan, termasuk mesjid, jika sudah tidak sesuai dengan tujuan pokok perwakafan.⁶

Adanya pendapat yang beragam dari para ulama ini tentu saja benda wakaf terdahulu dan hasilnya dijual dan dibeli kembali untuk wakaf yang baru oleh nazhir di Kecamatan Martapura, baik pada kasus kedua dan kasus ketiga, dan penjualan tanah wakaf dan hasilnya dibeli pada tanah yang baru pada kasus

⁶A. Faisal Haq, "Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia", Tesis, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1999), h. 58. t.d.

keempat, dapat kita ketahui kebolehan dan sebaliknya masih diperdebatkan jika menganalisis pendapat ulama yang berpariasi tersebut di atas.

Disisi lain praktik pengalifungsian wakaf pada kasus kedua dan kasus ketiga, dan kasus keempat, oleh nazhir di Kecamatan Martapura harus mengacu pada ketentuan ketentuan PP. RI. Nomor 28 tahun 1977 mempunyai persamaan tentang perubahan status harta wakaf. Dimana kedua konsep hukum ini sama menentukan, bahwa pada dasarnya tidak boleh dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Namun ada pengecualiannya yaitu dalam keadaan tertentu boleh dilakukan perubahan tetapi dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama⁷

Nampaknya pengalihfungsian harta wakaf pada kasus kedua dan kasus ketiga dan keempat itu, dilihat pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf, perlu pembenahan yang memadai, karena tidak ada izin menteri agama, karena pada kasus-kasus di atas masih memakai paham relegius yang membolehkan, sementara itu jika prosedur ini terabaikan sebagaimana bunyi Pasal 67, ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan

⁷Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, Cet. V, 2004) h. 38.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸

Dalam hukum Islam pada mulanya harta wakaf tidak boleh dialihfungsikan karena harta wakaf tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh di hibahkan kepada siapapun, dan tidak boleh diwariskan sebagaimana layaknya harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris si mayyit, bahkan harta wakaf tidak boleh dirusak oleh siapapun karena harta wakaf telah menjadi milik Allah swt. kecuali benar-benar telah terjadi kerusakan seperti pada kasus kedua dan ketiga, keterbengkalaiian, dan kondisi yang memaksa lainnya. seperti pada seperti pada kasus kesatu dan keempat.

Kemudian dalam pandangan peraturan yang lain, pengalihfungsian yang terjadi pada kasus kasus kedua, kasus ketiga, dan kasus keempat harus melalui pihak-pihak yang berwenang, seperti halnya kepala KUA, Bupati sampai dengan persetujuan menteri agama, pada kenyataannya penulis belum menemukannya padahal aturan-aturan tersebut juga pada dasarnya tidak menginginkan tanah wakaf yang diwakaf oleh siwakif menjadi terbengkalai, dalam kodisi yang tidak layak pakai seakan akan adanya upaya lain.

Pada kasus kedua, ketiga dan kasus keempat, penjualan benda akaf yang dilakukan oleh untuk pengalihfungsian wakaf untuk keperluan yang lain yang serupa, hendaknya sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan harta wakaf tersebut agar manfaatnya lebih baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

⁸Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 181.

Lebih jauh tentang pengalihfungsian wakaf oleh nazhir pada keempat kasus yang peneliti lakukan, semuanya belum ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, karena tidak ada satupun dari semua kasus-kasus di atas memohon perizinan, pada BWI, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan pada Pasal 4, ayat (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Berdasarkan Undang-Undang ini perubahan dapat dilakukan asal ada izin Badan Wakaf Indonesia dan peruntukannya tidak sesuai dengan ikrar wakaf.

Pada semua kasus di atas tidak ada izin BWI. Jadi secara Undang-Undang Perwakafan nomor 41 tahun 2004 perubahan ini masih perlu pembenahan prosedur. Menurut hemat penulis praktik pengalihfungsian wakaf pada kasus pertama kasus kedua, kasus ketiga, dan kasus keempat walaupun secara relegius, sebagian ulama fiqih dari berbagai mazhab ada yang membolehkan dan sebagian yang lain menolaknya, dengan berbagai alasan yang menjadi tolak ukur mereka masing-masing dalam menetapkan hukum boleh tidaknya tentang pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura secara teori, tetapi pendapat para ulama yang menjadi rujukan nazhir yang melakukan praktik pengalihfungsian wakaf di Kecamatan Martapura, agar lebih baik dan tidak terjadi kekhawatiran dikemudian hari, tentu saja ada maslahatnya jika dilengkapi dengan prosedur dimulai dari permohonan sampai

mendapatkan persetujuan/perizinan yang diberlakukan oleh pihak berwenang di Negara kita, agar peralihan tadi selain untuk menjembatani *ikhtilaf* yang terjadi dikalangan ummat dan juga untuk mempekuat mazhab yang menjadi anutan yang dipakai nazhir dalam praktik alihfungsi wakaf di desa masing-masing, jadi secara hukum praktikan peralihan itu bisa dipertanggungjawabkan keberadaanya baik secara moral maupun hukum formil.

Dalam kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga, dan pada kasus keempat pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura di atas merupakan upaya untuk pemeliharaan kelestarian benda-benda wakaf yang tidak bergerak, mesti dipertahankan wujud dan pemanfatannya harus tetap sesuai dengan tujuan yang telah diikrarkan oleh wakif kendatipun sebagian bendanya telah rusak. Pada kasus kesatu, benda wakaf telah dihibahkan pada mesjid yang lain tentu saja nilai peralihan benda wakaf tidak ada secara jual beli untuk kepentingan mesjid asalnya, tentu saja secara financial pembangunan mesjid tersebut tidak mendapatkan apa-apa, namun mengingat manfaatnya karena dimanfaatkan oleh mesjid yang lain, mungkin saja akan tetap lestari.

Dalam agama Islam kita harus melakukan kebaikan dalam hidup di dunia, dan di kita akan mendapat ganjaran diakhirat kelak, karena berwakaf adalah salah satu kebaikan yang harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk adanya praktik alihfungsi di dalamnya. Disisi lain pengalihfungsian yang dipraktikan oleh nazhir pada kusus-kusus di atas untuk menghindari adanya kelalaian dan penyia-nyian benda wakaf yang telah mengalami perubahan situasi dan kandisi yang harus

mendapatkan perhatian serius dari nazhir selaku pengelola wakaf si wakif, agar tidak terjadi keterbengkalaiian dan kemubazziran yang dianggap sebagai pemborosan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemubazziran termasuk, tindakan yang keliru dan tidak layak untuk lakukan oleh nazhir.

Lebih lanjut mengenai kasus kedua dan kasus ketiga, demikian pada kasus keempat praktik pengalihfungsian terhadap benda wakaf itu untuk menghindari terputusnya sedekah jariyah berupa wakaf, walaupun wujudnya masih utuh atau sudah berubah.

Praktik pengalihfungsian harta wakaf oleh nazhir pada semua kasus di atas adalah untuk merealisasikan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada siwakif selama kelestariannya terjaga dan di pakai oleh halayak ramai, oleh karena itu tidak boleh ditahan jika memang layak untuk dialihfungsikan agar harta wakaf si wakif terus dapat dimanfaatkan walaupun telah berubah wujudnya dari asalnya karena dialih kegunaannya, namun yang perlu diperhatikan nilainya senilai dengan wakaf yang lama.

Pada kasus kedua dan ketiga sampai pada kasus empat, di atas jika dikaitkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah harus memenuhi dua syarat membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat:

1. Penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila mesjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya

dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

2. Penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada mesjid mesjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun mesjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.⁹ Ibnu Quddamah, salah seorang pengikut mazhab Hambali dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.¹⁰ Jadi pada kasus kedua dan ketiga dan kasus keempat, jika menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Quddamah sudah cukup beralasan.

Mengenai kasus keempat di atas dimana nazhir melakukan penjualan tanah wakaf, kemudian nilainya untuk membeli tanah yang baru dan letaknya jauh dari jalan raya dengan alasan tertentu, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dan PP. RI Nomor 28 tahun 1977 mempunyai persamaan tentang perubahan status harta wakaf. Dimana kedua konsep hukum ini sama menentukan, bahwa pada

⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *op.cit.*, h. 81-82

¹⁰Adijani Al-Alabij, *op.cit.*, h.78

dasarnya tidak boleh dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Namun ada pengecualiannya yaitu dalam keadaan tertentu boleh dilakukan perubahan tetapi dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama¹¹. Pada kenyataannya dari empat kasus di atas juga belum ada yang mendapat persetujuan Menteri Agama.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat/responden pada kasus-kasus di atas ini merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan responden tentang hukum, khususnya Hukum Perwakafan, sehingga praktik alihfungsi dilakukan diluar ketentuan yang berlaku, Selain itu kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama, mempunyai dampak dimana semua responden yang ada tidak mengerti hukum. Pada semua nazhir masih kurang mengetahui tugas/wewenang sebagai pengelola wakaf.

Lebih lanjut analisis terhadap praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, menurut penulis, nazhir harus mengetahui ajaran agama tentang perwakafan secara luas, dan harus memiliki pengetahuan tentang alihfungsi wakaf secara mendalam, dan mengetahui Undang-Undang Perwakapan yang berlaku, serta aturan-aturan lainnya dalam pengelolaan wakaf, sampai dengan masalah alihfungsi. Dengan demikian akan tercipta pengelolaan wakaf yang dinamis, mampu menjadi lembaga sosial kemasyarakatan menuju kesejahteraan umat.

Jika ditelisik lebih jauh praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, pada keempat kasus di atas, memang menurut ulama fiqih

¹¹Adijani Al-Alabij, *Ibid*, h, 38.

kebolehan dan pelarangan alihfungsi wakaf yang dilakukan oleh nazhir masih diperdebatkan, hal ini mungkin saja bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap dalil wakaf. Dalil wakaf yang secara khusus mengatur tentang perwakafan dan menjadi sumber perbedaan pendapat tersebut adalah hadis riwayat Ibnu ‘Umar yang menceritakan peristiwa wakaf pertama dalam Islam yang dilakukan oleh ‘Umar Ibnu *al-Khaththab* atas sebidang tanahnya di Khaibar. Secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat ‘ulama-‘ulama fiqh bertitik tolak dari pemahaman mereka terhadap makna "penahanan asal harta wakaf" (*in syi'ta habasta ashlahā*). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian penahan asal harta itu adalah, bahwa status kepemilikan benda wakaf tetap berada ditangan si wakif tanpa berpindah kepada penerima wakaf, sedangkan yang diberikan itu adalah manfaat benda tersebut. Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun golongan pengikut Al-Syafi'iy berpendapat bahwa "penahanan asal harta wakaf" berarti "pengekalan bendanya". Oleh sebab itu, status kepemilikan terhadap benda wakaf berpindah menjadi milik Allah sejak saat diwakafkan dan untuk selama lamanya, tidak boleh dilakukan transaksi lagi atas benda wakaf yang telah diwakafkan oleh siwakif terhadap benda wakaf tersebut, baik dengan cara menjual pada pihak lain, menghibahkannya ataupun mewariskannya pada ahli waris. Dengan demikian, baik benda maupun manfaatnya mesti dikekalkan untuk tujuan wakaf yang dapat dirasakan kegunaannya.

Terhadap kasus-kasus di atas, Apabila ditetapkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan manfaat benda wakaf saja, sedang wujud bendanya tetap pada kekuasaan si wakif atau ahli warisnya (dalam hal wakif telah meninggal dunia), maka pengalihfungsian harta wakaf tidak dapat dilakukan kecuali setelah adanya izin dari pihak wakif atau ahli warisnya. Karena dalam hal ini, yang disebut wakaf bukan hartanya melainkan hasilnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta lainnya, ibadah wakaf dalam Islam sangat kepada dapat atau tidaknya harta tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuannya.

Mengenai kasus keempat tentang praktik pengalihfungsian wakaf tanah oleh nazhir di Kecamatan Martapura, pelaksanaan itu juga harus memperhatikan undang-undang mengenai perubahan status tanah wakaf Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, di sana sebutkan bahwa;

Dalam hal peralihan wakaf tanah pada kasus keempat di atas, selain harus mendapatkan izin Badan Perwakafan Indonesia, praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir pada wakaf tanah milikpun harus sesuai dengan prosedur perubahan status maupun penggunaan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor I tahun 1978 yaitu ;

Pasal 12 berbunyi;

1. Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazhir berkewajiban mengajukan permohonan Kepada Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag. secara hirarkis dengan menyebut alasannya .

2. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hararkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan .
3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan penggunaan wakaf ¹².

Pasal 13 berbunyi ;

1. Dalam hal ini ada permohonan perubahan, perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag. Berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan .
2. Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau status tanah wakaf.
3. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan Islam diberikan penggantian yang sekurang - kurangnya sesuai dengan ikrar wakaf ¹³

Pada kasus keempat di atas, baik permohonan untuk mengadakan peralihan sampai dengan perubahan status tanah wakaf harus mendapatkan gantian sekurang-kurangnya sesuai dengan ikrar wakif, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku ternyata hal ini belum terlaksana, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan kasus keempat praktik pengalihfungsian/tukar guling tanah wakaf oleh nazhir di Kecamatan Maratapura tanpa melalui Kantor Depag, secara hukum agama Islam tidaklah dianggap bertentangan, namun secara prosedur yang

¹²Departemen Agama RI , *op. cit.* , h. 106

¹³*ibid*, h. 107

berlaku dapatlah dipahami, hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan pengelola dan tingkat pemahaman responden tentang Peraturan Perwakafan sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977, dimana responden masih menggunakan kebiasaan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, dan didukung oleh mazhab tertentu yang membolehkan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) PP. No.28 Tahun 1977 jo Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1978. Hal ini dikarenakan pengelola tanah wakaf tidak melakukannya tanpa memperhatikan sesuai atau tidaknya praktik pengalihfungsian tanah wakaf yang mereka lakukan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, karena nazhir memang tidak mengetahui akan adanya ketentuan ini akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. Apalagi kalau tanah itu ditukar guling, ini akan berpengaruh terhadap status tanah wakaf tersebut yang seharusnya diperlukan izin Menteri Agama.

Disamping itu kasus keempat menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat/responden. Kesadaran hukum itu meliputi: pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan tentang hukum.¹⁴

Mengingat harta wakaf merupakan aset negara yang perlu dipertahankan keberadaannya, dan nilai alihfungsinya secara terus menerus dapat dipertahankan, karena hal ini secara umum tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola semata

¹⁴Hasil Simposium, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*, di Semarang Tanggal 19-22 Januari, 1975

bahkan menjadi tanggungjawab pemerintah, hendaknya peralihan itu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal tukar guling pada kasus keempat ini hendaknya selain pengalihfungsian harus sesuai aturan yang berlaku di atas, pengelolaan tanah wakaf juga harus memperhatikan instruksi presiden sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, Pasal 225, pada ayat (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Dan pada ayat (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. karena kepentingan umum.¹⁵

Akhirnya menurut hemat penulis pendapat para puqaha tentang praktik pengalihfungsian wakaf sangat diperlukan oleh nazhir, walaupun pendapat ulama yang bicara tentang perwakafan masih sedikit, namun masih relevan untuk dijadikan sumber rujukan untuk masyarakat kekinian, sementara secara hukum - hukum formil tentang wakaf telah memadai baik mengenai wakaf secara keseluruhan, maupun alihfungsi secara khusus. bahkan lengkap semua permasalahan wakaf telah dibahas secara detil sampai permasalahan alihfungsi harus dapat dipahami, dihayati dan

¹⁵*Instruksi Presiden No. 1/1991 Tentang Penyebarluasan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, 1991), h. 8.

dipakai oleh responden yang memikul amanah rakyat, agar tidak timbul permasalahan baru yang mungkin adanya kelalaian secara prosedur terhadap pengembangan tanah wakaf sebagai lembaga sosial kemasyarakatan.

Pendapat para fuqaha tentang perwakafan lebih menekankan pada himbawan moral, sementara pendapat para hukama' selain prosedur yang harus ditaati, juga jika tidak ditaati mengandung sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kemudian pengaruh yang timbul dari penjualan tanah wakaf itu, apabila tanah wakaf itu dirubah statusnya sebagai tanah wakaf, dengan cara tukar guling/dijual yang bersifat peralihan hak atas tanah, maka ini akan berakibat berubahnya status tanah itu menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain. Namun demikian alihfungsi dan status tanah wakaf tidaklah berpengaruh terhadap hakikat dari benda wakaf itu sendiri, walaupun tanah wakaf itu telah dialihfungsikan atau dipindahakan. Pengalihfunsian oleh responden pada kasus keempat ini hanyalah mengubah manfaatnya atau tempatnya saja, namun tidak mengubah hakikat tanah wakaf tersebut sebagai tanah wakaf.

B. Alasan Praktik Pengalihfunsian Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Martapura.

Setelah peneliti melakukan analisis pada praktik pengalihfunsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, maka tugas peneliti selanjutnya adalah menganalisis alasan-alasan yang yang menjadi factor penyebab terhadap praktik pengalihfunsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura.

Dari empat kasus yang diteliti ternyata alasan yang mendasari responden terhadap adanya praktik pengalifungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura tersebut dapat disebutkan sebagai berikut;

a. Mesjid Tidak Dapat Menampung Jumlah Jama'ah Shalat Yang Banyak

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan judul Tesis ini telah diketahui adanya salah satu alasan yang mendasari nazhir melakukan praktik pengalihfungsian wakaf di Kecamatan Martapura, alasannya adalah mesjid tidak lagi dapat menampung jumlah jama'ah yang banyak terjadi pada kasus kesatu. Mesjid adalah tempat ibadah umat Islam, yang sangat diperlukan oleh umat Islam keberadaannya, karena mesjid dibutuhkan sebagai sarana untuk melakukan ibadah yang dipardukan atas setiap muslim oleh Allah swt. selain itu mesjid dapat difungsikan untuk ibadah-ibadah lainnya. Searah dengan pesatnya pertumbuhan penduduk tentu saja lama kelamaan jumlah penduduk yang berjumlah pesat ini akan mempengaruhi daya tampung mesjid sebagai sarana yang penting bagi umat Islam hal ini dapat dilihat dengan banyaknya umat muslim melakukan ibadah dengan jumlah yang besar pada mesjid kasus kesatu, oleh karena perubahan situasi banyaknya jumlah umat Islam dari masa kemasa, kondisi zaman sekarang tentu saja merupakan perubahan kondisi masyarakat kekinian yang berbeda dengan masa yang lampau, pada masa lalu mesjid biasanya dapat menampung jumlah jama'ah masyarakat yang akan melaksanakan aktifitas keagamaan seperti halnya shalat.

Dalam sejarah hal semacam ini pernah terjadi, seperti yang halnya yang dilakukan oleh 'Umar memindah mesjid Kufah dan 'Usman membangun mesjid

Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan,¹⁶ karena kondisi mesjid Nabawi pada masa itu tidak muat lagi menampung jumlah jama'ah yang ada, demikian yang terjadi pada Mesjidil haram.

Selain itu mengenai alasan praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, telah disebutkan oleh Peraturan Pemerintah RI. Nomor 28 tahun 1977 pasal 11 pada bab I, yaitu karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum. Karena kepentingan umum perluasan mesjid pada kasus pertama di atas dapat diwujudkan apabila keadaannya sudah mendesak tidak dapat menampung jumlah jama'ah yang banyak demi kemaslahatan bersama. Alasan banyaknya jumlah jama'ah yang banyak merupakan latar belakang yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang dituangkan dengan kata mufakat oleh nazhir, hal ini untuk menghindari timbulnya masalah baru yang timbul setelah praktik pengalihfungsian telah terealisasi dengan baik, senada dengan ungkapan qawaid fiqhiyah yang artinya: Berubahnya hukum karena berubahnya kondisi zaman dan tempat. Zaman dahulu mesjid pada kasus pertama dapat menampung jumlah jama'ah, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, banyaknya minat komunitas muslim yang beribadah pada mesjid tersebut, tentu saja mengalami kondisi yang sulit untuk menampung semua jama'ah yang melakukan kewajibannya sebagai muslim yang taat. Dalam kaedah *ushul fiqh* hukum berlaku tergantung adanya sebab atau sebaliknya. Jadi pada kasus

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul-Kutubil-'Arabi, 1397), Cet. III, h. 530.

di atas sebab ramainya jumlah pengunjung untuk melakukan berbagai macam ibadah ada baiknya mesjid diperluas, untuk mencapai kemakmuran mesjid.

b. Dalam Keadaan Memaksa

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan telah ditemukan dua mesjid mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga tidak bisa untuk melakukan makmur mesjid sebagai sarana *fi_sabilillah* yaitu tepatnya pada kasus ke dua dan ketiga.

Dalam hal mesjid rusak berat tentu saja harta wakaf tidak bermanfaat, sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya lagi sebagaimana yang ditujukan oleh si wakif. sebagai orang yang diberi amanah untuk mengelola mesjid nazhir harus mencari jalan keluar supaya mesjid merupakan harta wakaf itu dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan *fiqh empirik* praktik menjual benda-benda wakaf yang telah dibabak oleh nazhir dan hasilnya untuk membangun mesjid yang baru boleh saja dilakukan asal ada alasan yang mendesak, alasan mesjid rusak berat adalah suatu kondisi yang boleh untuk kelestarian manfaat mesjid.

Sementara dalam peraturan yang ada tidak bisa dilakukan walau dalam keadaan memaksa, kecuali mendapatkan izin Menteri Agama. Persolaan adanya perizinan Menteri Agama dapat menjadi kendala jika dianggap sebagai prosedur yang tidak boleh diabaikan dalam masalah pengalihfungsian yang dilakukan oleh pengelola mesjid jika tidak terealisasi.

Ibnu Quddamah, salah seorang pengikut mazhab Hambali dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula,¹⁷ berdasarkan pendapat ini tindakan nazhir pada kasus kedua dan ketiga dalam praktik pengalihfungsian wakaf di Kecamatan Martapura dapat diartikan bahwa peralihan itu sebagai upaya optimal untuk menjadikan mesjid sebagai sarana sosial kemasyarakatan yang diprioritaskan untuk aktifitas keagamaan.

Dengan demikian, apabila harta wakaf yang ada pada mesjid pada kasus kedua dan kasus ketiga di atas tersebut, tidak dapat dimanfaatkan lagi, karena perubahan kondisi adanya penyusutan dan tingkat kerusakan dari benda wakaf itu sendiri, maka akan menyebabkan terjadinya pemubaziran (pemborosan) atau penelantaran benda-benda wakaf jika dibiarkan begitu saja.

Apabila hal ini terjadi, maka secara hukum perbuatan tersebut dilarang (haram), Oleh sebab itu, benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan terancam mengalami kehancuran secara sia-sia, upaya dibenarkan untuk membabak dan menjual, hasilnya dapat dibelikan kembali sebagai ganti wakaf yang lama.

Senada dengan alasan kasus kedua dan kasus ketiga di atas Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat antara lain:

¹⁷*Ibid*, h. 78

Pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila mesjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

Kedua, Penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada mesjid mesjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun mesjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.¹⁸

Jadi keadaan mendesak atau tuntutan kemaslahatn hendaknya lebih diperhatikan oleh nazhir dalam melakukan pengalihfungsian wakaf yang terjadi pada kasus di atas. Kerusakan sama saja halnya dengan keadaan yang sulit, keadaan yang memaksa seperti pada kasus kedua dan kasus ketiga di atas memaksa untuk mengambil kebijakan melestarikan benda wakaf sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam hidup bermasyarakat.

Dalam upaya perbaikan karena dalam kondisi dorurat, tersebut tidak perlu mendapat izin terlebih dahulu dari wakif, tetapi mesti melalui permohonan dari nazhir atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dan mendapat izin dari

¹⁸Taqdir Arsyad Dan Abul-Hasan, *Op.Cit.*, h. 553.

Menteri Agama. Apabila hal itu memang sangat dibutuhkan, maka kebutuhan itu sendiri kadangkala dapat meningkat menjadi sesuatu yang diharuskan sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة¹⁹

"Kepentingan atau hajjah itu ditempatkan pada tempat darurat"

Dengan kata lain, bahwa pada prinsipnya terhadap harta wakaf tidak dapat dilakukan perubahan baik perubahan terhadap status, maupun penggunaan selain dengan pada apa yang dimaksud di dalam ikrar wakaf. Namun kenyataannya perlu diakui bahwa di dunia fana ini tidak ada suatu pun yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak perubahan yang tidak dilakukan olehnya.

Keadaan-keadaan keterpaksaan melakukan praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir ini termasuk pengecualian dari jangkauan ketentuan. Dengan kata lain bahwa jika suatu benda wakaf dihadapkan kepada kenyataan tersebut di atas dapat saja dilakukan suatu peralihan atasnya, baik perubahan status, peruntukkan ataupun penggunaannya.

Perubahan dimaksud dikarenakan adanya perubahan kondisi benda wakaf yang rusak, dalam kondisi yang memprihatinkan. atau terpaksa dialihfungsikan dalam prakteknya tidaklah boleh sekehendak hati nazhir dapat mengubahnya. Akan tetapi nazhir yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan restu dan izin dan

¹⁹Jalaluddin, Abdullah Ibn Abi Bakr, al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 59

Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjuknya. Ketentuan semacam ini dimaksudkan guna menjamin obyektivitas alasan-alasan perubahan atau penggantian tanah wakaf, sehingga kelestarian dan keabadian amalan dan manfaat tanah wakaf tersebut dapat diamankan, dan dapat pula dinilai bahwa perubahan wakaf secara obyektif dipandang perlu dan medesak, agar benda wakaf tetap bermanfaat sehingga tujuan wakaf dapat tercipta. Jika melihat kebelakang berdasarkan pengalaman pahit masa lampau tentang banyaknya kejadian adanya perubahan status maupun perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan dapat merugikan lembaga wakaf itu sendiri, maka oleh politik hukum Agraria Nasional yang digariskan di dalam PP No. 28 Tahun 1977, nazhir tidak diperkenankan melakukan perubahan baik terhadap status maupun peruntukannya tanpa alasan yang jelas dan melalui prosedur yang telah ditentukan. Pengalihfungsian bahan tanah wakaf dengan alasan memaksa pada kasus kedua dan kasus ketiga, baik terhadap status maupun peruntukannya oleh nazhir hanya dapat dibenarkan apabila terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Seperti, karena keadaan benda baik jendela, lantai, dinding, dan atap wakaf mesjid pada kasus kedua dan ketiga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, atau karena kepentingan umum menghendakinya. Meskipun demikian, kebolehan inipun harus dilakukannya melalui prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Di dalam suatu permohonan perubahan-perubahan baik terhadap peruntukan lain dan apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun terhadap status tanah

wakaf itu sendiri kepada pejabat yang berwenang atas pemberian izin perubahan tersebut, keberperanan nazhir dalam hal ini, mengingat ia adalah sebagai manager harta wakaf, sehingga ia tahu persis tentang keadaan obyek tanah wakaf yang akan dialihkan statusnya maupun akan dirubah peruntukan atau kegunaannya setelah diwakafkan.

Dalam hal nazhir pada kasus kedua dan kasus ketiga yang kemudian bermaksud merubah peruntukan atau penggunaan lain dan apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf oleh si wakif maupun perubahan atas status harta wakaf itu, maka nazhir paada kasus kedua dan kasus ketiga wajib mengajukan permohonannya dengan disertai alasan yang kuat/dalam keadaan yang memaksa dan menyakinkan sebagaimana tersebut di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan secara khirarkis. Permohonan tersebut, selanjutnya disertai suatu pertimbangan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya harus diteruskan secara hirarkis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang sejenis C.q Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Propinsi setempat.

Untuk suatu permohonan perubahan atas peruntukan atau penggunaan lain dan pada apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya secara tertulis. Jadi atas permohonan semacam ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam itu sendiri tidak perlu meneruskan permohonan tersebut

kepada Menteri Agama. Lain halnya apabila permohonan tersebut menyangkut masalah perubahan atas status tanah wakafnya itu sendiri, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang Urusan Agama Islam yang bersangkutan tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya atas permohonan tersebut, melainkan ia dengan menyertakan suatu pertimbangan harus meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Ini karena wewenang untuk menyetujui atau menolaknya adalah merupakan wewenang Direktur Jenderal dimaksud. Dan permohonan perubahan tersebut akan dapat disetujui, apabila perubahannya itu sendiri diberikan penggantian yang sekurang kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Dengan adanya perubahan peruntukan atau penggunaan lain yang telah dilakukan pada kasus kedua dan ketiga, dan pada apa yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf maupun perubahan atas status tanah wakafnya karena adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka untuk kepentingan administrasi pertanahan, hal tersebut oleh nazhir yang bersangkutan harus dilaporkan kepada kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat guna untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Penyimpangan-penyimpangan dan prosedur dari ketentuan tersebut di atas, selain terkena sanksi pidana, juga perubahan tersebut dengan sendirinya batal menurut hukum. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukan dan pada apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf

maupun perubahan status atas tanah wakafnya itu sendiri, pelaksanaannya dibatasi secara ketat, mulai dari ada alasan yang mendasari seperti pada kasus kedua dan kasus ketiga. Sampai pada adanya perizinan. Hal ini tentu dimaksudkan agar dapat dihindarkan praktek-praktek yang dapat merugikan eksistensi dan keberadaan masalah perwakafan itu sendiri.

Karena itu, meski melalui prosedur dan proses yang panjang, Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan peluang dibolehkannya mengubah atau mengalihfungsikan benda wakaf. Demikian pula diatur dalam PP. Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda wakaf itu tidak dapat lagi dimiliki, karena itu di dalam sebuah hadis rasulullah saw. disebutkan, bahwa harta wakaf itu tidak dihibahkan, diperjualbelikan atau diwariskan.

Kendatipun demikian adanya, meski tidak bisa dimiliki oleh siapapun, maka pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab nazhir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun oleh PPAIW (Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut peraturan perundang-undangan, maupun sebaliknya.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak Allah semata. Menurut Abu al-A'la al-Maududi, corak pemilikan yang semacam

inilah yang sesungguhnya merupakan gambaran fitrah yang benar dalam Islam.²⁰ Jadi, walaupun manusia memiliki hara sesungguhnya adalah milik yang bersifat nisbi. Memang manusia tidak luput dari kekurangan sebagai makhluk ciptaan Allah, namun demikian manusia tidak boleh berpangku tangan tanpa ada usaha ikhtiyar kearah perubahan yang lebih baik demi mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan *maqasidu al-syar'iah*.

Dapat kita lihat bahwa perumus Kompilasi Hukum Islam secara bijaksana menggabungkan pendapat yang berkembang di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiah menyangkut pengalihfungsian benda wakaf. Dari sisi pengekaln materi benda wakaf harus dihindarkan dari transaksi perdata, seperti menghibahkan, menjual-belikan, mewariskan, diadopsi dari pendapat Syafi'iyah. Sementara dari sisi pemeliharaan pengekaln manfaat benda wakaf itu untuk kepentingan umum diadopsi dari pendapat Hanafiah. Dalam makna lain, bahwa pengalihfungsian benda wakaf pada dasarnya tidak dibenarkan, sesuai dengan ketentuan 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dalam rangka pengekaln manfaat benda wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif (ayat 2 huruf a) dan untuk kepentingan umum (ayat 2 huruf b) Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang batasan kepentingan umum, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b. Hal ini dimaksudkan agar penilaian kelayakan pengalihfungsian suatu benda wakaf dari apa yang diikrarkan semula diserahkan

²⁰M.Abd. Al-Jawad, *Al-Milkiyah al-Aradi, Fi al-Islam*, (Beirut: Mansya' al-Ma'arif, t.th), Juz. II, h. 262.

sepenuhnya kepada masyarakat umum melalui permohonan tertulis dari nazhir yang disetujui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengalihfungsian benda wakaf dari pemanfaatan semula kepada pemanfaatan lain atau penggantian harta wakaf dengan barang yang lebih bermanfaat, dibenarkan dalam hukum Islam, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai tujuan ikrar wakaf, atau terdapat manfaat yang lebih besar yang dapat diambil dari benda tersebut, demi kelestarian manfaat sesuai dengan harapan pengalihfungsian.

Apabila harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat banyak, baik oleh karena perubahan situasi zaman dan kondisi dilapangan sebagaimana yang terjadi pada kasus kedua dan kasus ketiga alasannya rusak berat karena penyusutan dan tingkat kerusakan dari benda wakaf itu sendiri menimbulkan kesulitan komunitas muslim untuk melakukan aktifitas di mesjid sebagaimana layaknya, maka akan menyebabkan terjadinya pemubaziran (pemborosan) atau penelantaran benda-benda wakaf jika responden tidak menyikapi persoalan yang terjadi secara serius. Apabila hal ini terjadi, maka secara hukum perbuatan tersebut dilarang (haram), Oleh sebab itu, benda wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan terancam mengalami kehancuran secara sia-sia, nazhir mesjid pada kasus kedua dan kasus ketiga dibenarkan untuk dialihfungsikan, baik dengan dijual dan diganti dengan benda wakaf yang lain dalam paham hukum Islam. Demikian pula halnya apabila benda-benda wakaf tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar

daripada pemanfaatan semula, namun pemanfaatan yang baru tidak sesuai dengan ikrar wakaf, maka dalam hal ini menurut hemat penulis dibolehkan untuk dialihfungsikan kepada pemanfaatan yang lebih besar, karena hakikat dari wakaf itu sendiri adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum. Namun secara peraturan yang berlaku responden belum mengerti dan bahkan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu masih perlu pembenahan prosedur. Bahkan instansi terkait tidak mengetahui adanya praktik pengalihfungsian wakaf yang telah dilaksanakan oleh responden.

Dalil lain tindakan ‘Umar ibnu *al-Khaththab* dan ‘Usman ibnu ‘Affan yang pernah memindahkan mesjid dan menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai pasar. Demikian pula tindakan ‘Usman ibnu ‘Affan yang membangun mesjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan memberi tambahan.²¹

Adapun adanya kalimat "*la yabi'u, wa la yuhabu, wa la yuratsu*" (tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan) dalam hadist Ibnu ‘Umar, tidak bertentangan dengan mengalihfungsikan harta wakaf yang dilakukan oleh *nazhir/responden* pada kasus-kasus yang di teliti oleh penulis, karena dalam hal ini, *substansi* wakaf tersebut tidak dihilangkan, hanya saja dialihfungsikan kepada pemanfaatan yang lebih baik, demi mengoptimalisasikan pemanfaatan harta wakaf, karena ada alasan yang mendukung.

Mengingat harta wakaf itu telah menjadi milik Allah dan dimanfaatkan oleh publik, maka yang boleh mengalihfungsikan atau mengubah dan menggantinya

²¹Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 530.

hanyalah pemerintah selaku yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini telah ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan yakni Menteri Agama dengan permohonan tertulis dari nazhir berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat di wilayah harta wakaf itu berada. Dengan demikian, segala bentuk pemubaziran atau penyaliran harta wakaf dapat dihindari dan dapat pula dikonstruksi bentuk-bentuk wakaf baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik, jadi praktik pengalihfungsian pada semua kasus di atas perlu di sesuaikan dengan hukum positif yang diberlakukan.

Dalam hukum Islam praktik pengalihfungsian harta wakaf oleh pihak pengelola pada semua kasus di atas itu bukan berarti menghilangkan substansi benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif sesuai dengan ikrar wakafnya. Pengalihfungsian itu hanya bertujuan memenuhi fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh sebab itu, harta wakaf yang telah dialihfungsikan tetap sebagai harta wakaf, yakni tetap menjadi milik publik tidak berubah menjadi harta orang perorang. Karena harta wakaf yang baru tersebut tentu saja tidak akan pernah ada tanpa adanya harta yang lama yang dimodifikasi pemanfaatannya ke dalam bentuk yang baru. Di sinilah terlihat salah satu bentuk adaptabilitas hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan segala situasi dan kondisi masa (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Kemudian dari itu sejauh pengamatan penulis, kajian fikih klasik dan kontemporer yang membahas masalah wakaf masih sedikit jumlahnya jika dibanding

hukum positif di negara kita, bahkan hukum positif mengawal peralihan wakaf dengan ketat, baik wakaf yang bergerak atau sebaliknya, disinilah pengalihfungsian wakaf harus lebih banyak lagi dibicarakan oleh fuqaha sebagai jawaban yang memadai untuk dijadikan rujukan pada masyarakat kekinian, mengingat kompleksnya permasalahan wakaf termasuk praktik alihfungsi, tentu saja untuk mengendalikan khawatir adanya penyalahgunaan wewenang para pengelola wakaf.

Pada umumnya praktik peralihan wakaf di atas baik pada kasus kesatu, kasus kedua, kasus ketiga, dan keempat, mensyaratkan bahwa harta wakaf haruslah dimanfaatkan langsung hasilnya secara utuh sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*waqif*).

Pemahaman terhadap syarat dimaksud dapat dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha tentang wakaf. Perbincangan fuqaha menyangkut pemanfa'atan harta wakaf sampai pada tataran diskursus tentang menjual dan mengganti harta wakaf. Hanya saja, tela'ahan terhadap pengalihfungsian harta wakaf masih diperdebatkan boleh tidaknya untuk dialihfungsikan. Jadi dengan kehadiran hukum positif diharapkan sebagai menyeimbangkan masalah khilafiyah pengalihfungsian wakaf, setidaknya semua benda wakaf terpelihara dengan baik dan dapat dikembangkan, serta terlindungi.

Kemudian jika pengalihfungsian harta wakaf pada kasus-kasus di atas itu jika dilihat pada peraturan perundang-undangan tentang Wakaf, maka orang yang melakukan pengalihfungsian itu hendaknya mengerti, akan ada sanksi pidana sebagaimana bunyi Pasal 67, ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja

menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).²²

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Pada prinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Menurut Syafi'i, harta wakaf selamanya tidak boleh ditukarkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, harta benda wakaf dapat ditukar jika harta wakaf tersebut sudah tidak dapat dikelola sesuai peruntukan kecuali dengan ditukar atau karena kemaslahatan umum, tentu yang sangat diprioritaskan agar terwujud.

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dan ditukar. Pasal 41 menjelaskan perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata

²²Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 181

ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan rencana umum tata ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Penukaran dapat dilakukan oleh Menteri Agama RI setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupate/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, kontor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Oleh karenanya, pengalihfungsian benda wakaf seperti jendela mesjid, dinding mesjid yang dari kayu ulin, bahkan atafnya,dan juga tanah wakaf pada dasarnya tidak boleh kecuali karena alasan kemaslahatan yang mendesak. Merubah status harta benda wakaf harus ditukar dengan yang senilai harganya dan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Tidak boleh merubah status wakaf mesjid, dan tanah wakaf, karena selain perubahan status tanah wakaf yang tidak boleh ditukar menurut hukum Islam pada prinsipnya haram. Maka hukum merubah benda wakaf mesjid, pada kasus kesatu kedua, dan ketiga, menjual tanah wakaf pada kasus keempat hukumnya haram dan

dilarang oleh undang-undang kecuali karena kemaslahatan yang bersifat mendesak. Jika dibiarkan akan berbahaya, dan berdosa, karena dalam keadaan terpaksa atau mendesak sesuatu yang dilarang boleh dilakukan seperlunya.

Wakaf menurut definisi ulama adalah menyerahkan harta miliknya yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya serta mengabadikan pokoknya. Sedangkan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut kedua definisi ini jelas bahwa wakaf menurut paradigma para ulama fiqh adalah untuk selamanya. Akan tetapi berdasarkan ijtihad para ulama kontemporer bahwa wakaf adalah perbuatan baik yang esensinya adalah untuk kemaslahatan, maka wakaf harta yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu diperbolehkan. Dengan adanya dua definisi di atas, pada semua kasus-kasus pengalihfungsian oleh nazhir di atas kecenderungannya untuk selama-lamanya. Sedangkan ulama kontemporer sesuai dengan tujuan wakaf yaitu kemaslahatan yang perlu diwujudkan oleh nazhir

Alasan dalam keadaan terpaksa, nazhir melaksanakan pengalihfungsian benda wakaf mesjid, karena mesjid mengalami kebocoran atap, bangunan mesjid sudah miring/robah tepatnya terjadi pada kasus ke dua dan ketiga sudah memadai dengan adanya alasan yang kuat tersebut jika ditinjau dari aspek definisi ulama kontemporer

karena, karena kelompok ulama ini memaknai kemaslahatan komunitas muslim sesuai dengan *maqasid al-syar'iah*, dengan alasan darurat, karena dalam keadaan darurat, pada prinsipnya sesuatu yang dilarang boleh dilakukan apabila yang dilarang itu ditempuh dalam keadaan yang sangat dibutuhkan, bahkan wajib untuk menghindari hancurnya benda wakaf yang telah mengalami hilang atau berkurang manfaatnya sebagaimana yang diharapkan dari tujuan wakaf.

Namun disisi lain, jika pemerintah tidak menyetujui adanya pengalihfungsian itu walaupun ada alasan kuat karena tidak diproses secara prosedur hukum yang ada, maka perubahan itu bisa dibatalkan demi hukum.

Hal ini dapat kita kembalikan kepada ketentuan di dalam hukum fiqih Islam bahwa wakaf harus bersifat kekal, dan terus menerus serta tujuannya harus untuk kepentingan peribadatan atau setidaknya untuk kepentingan umum, maka harus ada alasan yang dianggap memadai (dharurat), dan alasan itu harus dimuat dalam prosedur pengalihfungsian dimulai dari adanya permohonan sampai dengan mendapatkan izin oleh pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan proses praktik alihfungsi.

C. Berdekatan Dengan Jalan Raya.

Jalan merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat beraktifitas sehari-hari, oleh karena itu jalan sebagai infrastruktur ini tentu saja dipakai oleh masyarakat umum dengan menggunakan kendaraan yang beroda dua, roda empat, bahkan tidak jarang jalan raya digunakan oleh masyarakat untuk berjalan

kaki ketika berolah raga ataupun kegiatan lainnya. Karena ramainya pengguna jalan tentu saja suara mesin, manusia dan lainnya agak nyaring, bahkan membisingkan, hal ini jika dihubungkan perlunya ketenangan, kehusyu'an dalam beribadah tentu saja membuat masyarakat terganggu.

Dalam kasus empat telah terlihat bahwa tanah wakaf dijual oleh pengelola wakaf dengan alasan berdekatan dengan jalan raya hal ini bisa dimaklumi, karena tanah yang diwakafkan merupakan salah satu benda yang tidak bergerak dan tidak bisa dipindah kecuali dengan menjual tanah tersebut.

Hal ini dilakukan oleh responden karena tanah tersebut berdampingan dengan jalan raya, sementara si wakif berikrar tanah wakaf ini untuk kepentingan ibadah dengan membangun langgar di atas tanah tersebut, mengingat alasan di atas sebagai hasil rapat, maka disepakati untuk dijual dan nilainya untuk membeli tanah baru sebagai pengganti tanah wakaf yang lama, penjualan tanah wakaf ini siwakif tidak diberi informasi.

Dalam Islam wakaf disyari'akan, wakaf dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama, karena wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf seperti kasus keempat wakif memberi tanah wakaf kemudian dijual oleh nazhir, kemudian nilainya untuk membeli tanah wakaf yang baru, alasannya adalah karena berdekatan dengan jalan raya mendapat pahala dari Allah swt. karena mentaati perintah-Nya untuk mengembangkan potensi wakaf yang bernilai agama dan sosial ekonomi.

Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena disyari'atkannya wakaf tanah pada kasus keempat itu mengandung unsur ekonomi dan sosial, dalam kegiatan wakaf pada kasus keempat melalui uluran tangan seseorang yang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Pada kasus keempat tanah wakaf ditukar dengan transaksi jual beli dan hasilnya dialihkan ketempat yang agak aman dari kebisingan tehnologi, karena dianggap oleh nazhir agak mengganggu ketenangan dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan, jika sarana ibadah dibangun pada posisi yang berdekatan dengan jalan. Memang aktifitas pengalihfungsian tanah wakaf ada dampak negatifnya tanah wakaf tersebut sudah dipakai oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Namun dari aspek positifnya praktik pengalihfungsian oleh nazhir pada kasus keempat di atas ada sisi positifnya antara lain masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Tidak dalam kondisi kebisingan.

Hal ini senada diungkapkan oleh kaedah fiqhiyah;

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح²³

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Maksudnya menghindari gangguan yang bisa merusak ketenangan ibadah lebih diutamakan dari mengerjakan kebaikan yang lain. Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukannya oleh nazhir hanya dapat dibenarkan apabila

²³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 29

terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Pada kasus keempat didapati suatu keadaan atau alasan yang mendasar, bahwa mengalihfungsikan tanah wakaf dikarenakan bedekatan dengan jalan raya, yang dianggap mengganggu aktifitas keagamaan jika di tanah tersebut dibangun langgar.

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang sangat erat hubungannya dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu masalah wakaf selain terikat dengan aturan-aturan agama Islam juga terikat dengan Hukum Agraria Nasional.

Karena pentingnya masalah wakaf ini dalam Hukum Agraria Nasional yang menganut paham, bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial.²⁴ Jadi kebolehan ini pun harus dilakukannya melalui prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keberperanan nazhir dalam hal ini sangat dibutuhkan, mengingat ia adalah sebagai manager harta wakaf, hendaknya ia tahu persis tentang keadaan obyek tanah wakaf yang akan dialihkan statusnya maupun akan dirubah peruntukan atau kegunaannya setelah diwakafkan.

Menurut hemat penulis perubahan status, pergantian benda wakaf dan tanah wakaf pada kasus-kasus di atas dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian dalam keadaan dharurat dan prinsip maslahat,

²⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, *Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 1 Ayat (2) dan pasal (6)

dalam hukum positif dan dikalangan ahli hukum pikir Islam dari berbagai mazhab, praktik pengalihfungsian itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat benda-benda wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Maka pada kasus-kasus yang diteliti jika kita sepakat, kecenderungan seperti ini dapat kita lakukan, berbeda halnya dengan ibadah-ibadah lainnya yang tidak berhubungan sama sekali dengan harta wakaf.

Harapan peneliti, terhadap perubahan status, atau sebaliknya yang ada pada pengalihfungsian wakaf pada semua kasus di atas, harus dilihat dari berbagai ketentuan dan permasalahan yang terjadi, terjadinya perbedaan pemahaman dari boleh atau tidaknya merubah fungsi wakaf, yang jelas wakaf akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umum.

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang mengembirakan pahalanya mengalir terus karena kekal manfaatnya.

Akhirnya penelitian tentang praktik pengalihfungsian benda wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura dapat di simpulkan bahwa masalah yang diteliti ini masih diperdebatkan, artinya ada ulama yang membolehkan untuk melakukan pengalihfungsian dan adapula sebagian yang lain melarangnya. Nazhir yang mengikuti ulama yang membolehkan untuk mengalioh fungsikan benda wakaf adalah

hal yang wajar karena perbedaan pendapat ulama adalah rahmat, pada pendapat lain seperti yang diungkapkan oleh ulama ahli kaidah fiqhiyah mengatakan bahwa apabila dalam sebuah permasalahan terdapat perbedaan pendapat ulama, maka memilih salah satu pendapat tidaklah dianggap maksiat. Bahkan nazhir yang mengambil pendapat yang rajih dan keluar dari yang khilapiah adalah dianjurkan. Jadi secara religious pengalihfungsian yang dilakukan oleh nazhir terhadap benda wakaf yang ada di Martapura secara hukum Islam adalah sah, namun secara administrasi belum sempurna karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah pemaparan dalam bab-bab di atas tentang praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar oleh peneliti, maka pada bagian akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian Tesis ini, akan diambil kesimpulan tentang praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang telah diketemukan adalah sebagai berikut:

1. praktik pengalihfungsian Dengan cara menghibahkan benda wakaf yang terdahulu
2. Dengan cara jual dan hasil dimanfaatkan untuk membeli wakaf yang baru

Adapun yang menjadi alasan praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Karena mesjid tidak dapat menampung jumlah jama'ah yang banyak terjadi pada kasus pertama
2. Dalam keadaan terpaksa terjadi pada kasus kedua dan kasus ketiga
3. Berdekatan dengan jalan raya terjadi pada kasus keempat

Adapun akibat yang timbul dari adanya praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Masyarakat dapat memanfaatkan kelestarian pelaksanaan pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, terjadi pada seluruh kasus yang telah diteliti dilapangan.

Kemudian analisis hukum Islam pada semua kasus yang diteliti dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura ada yang pro dan ada yang kontra, dan secara perundang-undangan tidak praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura tidak procedural.

B. Saran dan Rekomendasi

a. Saran

1. Dalam pelaksanaan pengalihfungsian harta wakaf yang telah dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, masih diperlukan bimbingan dan penyuluhan oleh pihak yang berwenang, agar nazhir yang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang yang diserahi amanah dalam pengelolaan wakaf betul-betul sesuai dengan paham keagamaan yang benar, mengetahui dan mampu memahami dan menghayati prosedur tentang perwakafan pada umumnya, dan mengetahui sejumlah rangkaian prosedur tentang pengalihfungsian wakaf yang telah diberlakukan oleh pemerintah pada khususnya, serta menyadari sanksi-sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang jika hal ini terjadi dikemudian hari.
2. Kepada semua pihak yang akan mewakafkan hartanya hendaknya melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dikemudian hari jika terjadi

pengalihfungsian wakaf, baik perubahan status atau sebaliknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, terhindar dari kesalahan yang dapat menimbulkan permasalahan yang baru, dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan dihadapan Allah swt. diakhirat kelak.

3. Wakaf merupakan lembaga sosial kemasyarakatan harus dikelola oleh nazhir wakaf yang disertai amanah secara benar dan dikelola seoptimal mungkin agar dapat di kembangkan dan diberdayakan sesuai dengan tujuan wakaf yang seharusnya .
4. Agar harta wakaf yang telah diwakafkan terjamin dalam pengelolaan dan pengalihfungsianannya agaknya perlu pengawasan dan pengamanan yang memadai oleh pihak-pihak yang berwenang.